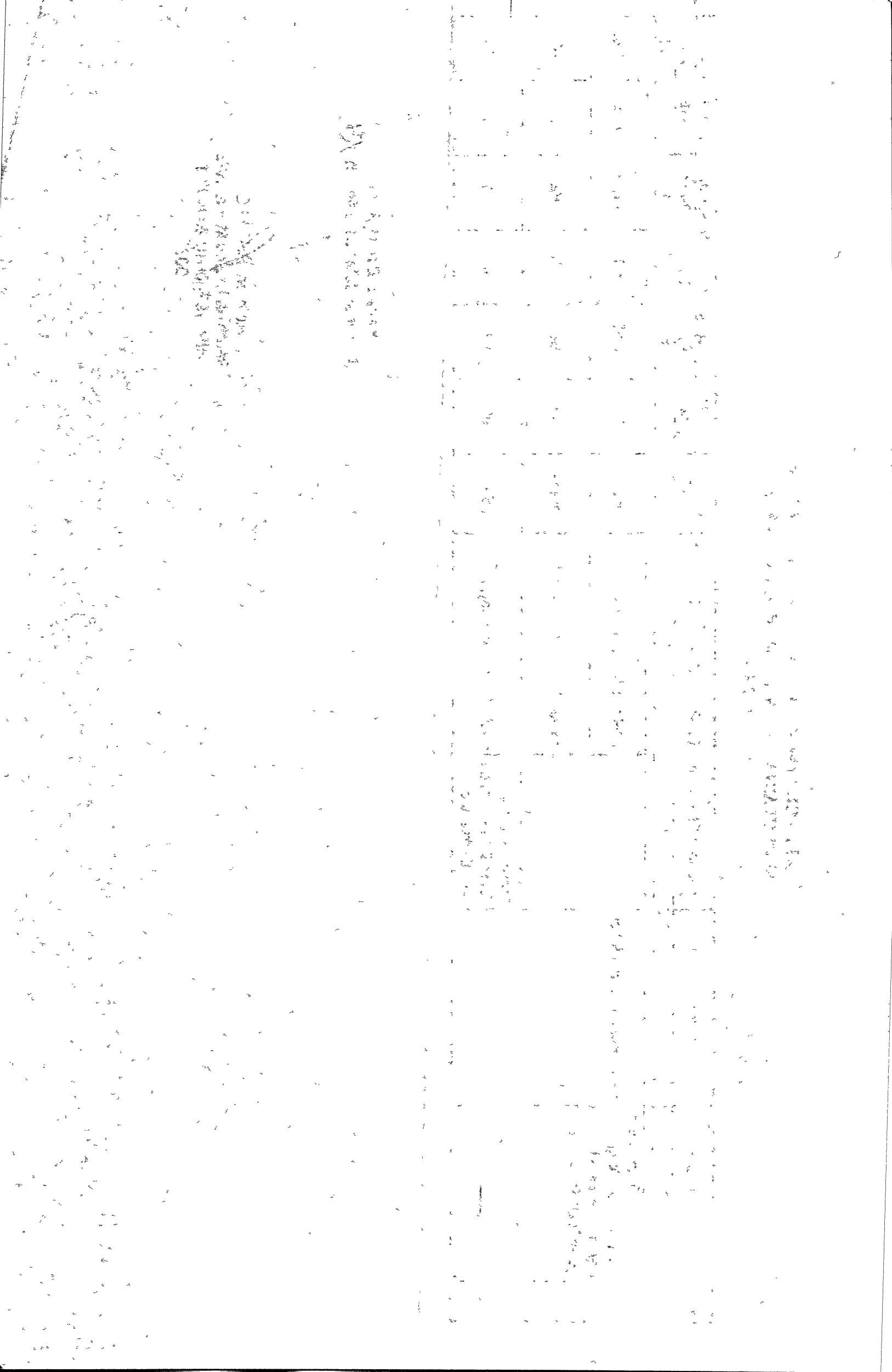


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI  
TENGAH

| No. | Tujuan                                                                                | Indikator Tujuan           | Sasaran Strategis                                     | Indikator Sasaran Strategis | Satuan | Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke: . . . |       |       |       |      |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|
|     |                                                                                       |                            |                                                       |                             |        | 2025                                                 | 2026  | 2027  | 2028  | 2029 | 2030  |
| 1   | 2                                                                                     | 3                          | 4                                                     | 5                           | 6      | 7                                                    | 8     | 9     | 10    | 11   | 12    |
| 1   | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Demokratis, Bersih, Inovatif dan Kolaboratif | Indeks Reformasi Birokrasi |                                                       | Indeks Reformasi Hukum      | Indeks | 70                                                   | 70,38 | 70,75 | 71,13 | 71,5 | 71,88 |
|     |                                                                                       |                            |                                                       | Indeks Kualitas Kebijakan   | Indeks | 55                                                   | 58    | 60    | 62    | 65   | 67    |
|     |                                                                                       |                            | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat  | Indeks | 88                                                   | 89    | 90    | 91    | 92   | 93    |

Kepala Biro Hukum  
Provinsi Sulawesi Tengah *Rt*

*Adiman, S.H., M.Si*  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19740610 200003 1  
007



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI  
TENGAH TAHUN 2025

| No. | Tujuan                                                                    | Indikator Tujuan           | Sasaran Strategis                                     | Indikator Sasaran Strategis | Penjelasan/Formulasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sumber Data       | Penanggung gjawab |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                         | 3                          | 4                                                     | 5                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                 | 8                 |
| 1   | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif Dan kolaboratif | Indeks Reformasi Birokrasi | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas | Indeks Reformasi Hukum      | Indeks Reformasi Hukum (IRH) dihitung dengan menjumlahkan nilai dari empat variabel utama yang telah dikalikan dengan bobot masing-masing; Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi; Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas; Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu; Penataan Database Peraturan Perundang-undangan. | Kementerian Hukum | Kepala Biro Hukum |
|     |                                                                           |                            |                                                       | Indeks Kualitas Kebijakan   | Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dihitung dengan menjumlahkan skor dari lima komponen utama sesuai bobotnya. Perencanaan kebijakan diberi bobot dua puluh persen, implementasi kebijakan dua puluh lima persen, evaluasi dan keberlanjutan kebijakan tiga puluh persen, transparansi serta partisipasi publik lima belas persen, dan pelibatan analisis kebijakan sepuluh persen.                                                                                                                                                 | LAN               | Kepala Biro Hukum |
|     |                                                                           |                            |                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat  | Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung dari rata-rata nilai seluruh unsur pelayanan yang dinilai responden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data Internal     | Kepala Biro Hukum |

Kepala Biro Hukum  
Provinsi Sulawesi Tengah

Adiman, SH., M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19740610 200003 1  
007

